

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ainul Syamsu, Muhammad, 2016, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andrisman, Tri, 2009, *Hukum Pidana : Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung.
- Arifin Hoesein, Zainal, 2016, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Sejarah, Kedudukan, Fungsi dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Konstitusi*, Setara Press, Malang.
- Ashshofa, Burhan 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.
- _____, 1996, *Sistem Peradilan Pidana : Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Putra Abardin, Bandung.
- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Perihal Perundang-Undangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bertens, Kees, 2018, *Sejarah Filsafat Yunani Edisi Revisi 2018*, Kanisius, Yogyakarta.
- Budihardjo, Miriam, Soelaeman Soemardi, Benedict ROG Anderson, Koentjaraningrat, Soemarsaid Moertono, A. Rahman Zainuddin, 1991, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2016, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djoko Sumaryanto, A., 2009, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Negara*, Pretasi Pustaka, Jakarta.
- .

- Effendi, Jonaedi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Kencana, Depok.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Farida, Maria, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Fauzan, H.M., 2013, *Peranan PERMA dan SEMA Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan Yang Agung*, Prenanda Media Group, Jakarta.
- Goesniadhie, Kusnu, 2006, *Harmonisasi Dalam Perspektif Perundang-Undangan (Lex Specialis Suatu Masalah)*, JP Books, Surabaya.
- Hamzah, Andi, 1991, *Korupsi di indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Pradnya Paramitam*, Jakarta.
- _____, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika.
- Hartanti, Evi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta.
- J.L Kriekhoff, Valerine, 2014, *Pendulum Antinomi Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Kadir Muhammad, Abdul, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kamil, Ahmad 2012, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Prenanda Group, Jakarta.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.

Karnasudirdja, H. Eddy Djunaedi, 1983, *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*, Jakarta

Karnasudirdja, H. Eddy Djunaedi, 1984, *Standar Pemidanaan*, Lokakarya Pemidanaan Dalam Musyawarah Hakim Indonesia Ke VIII, Jakarta.

Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Lamintang, P.A.F dan Teo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lamintang, P.A.F, 1991, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan-Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Pioner Jaya, Bandung.

M. Hadjon, Philipus, 2009, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Mahmud Marzuki, Peter, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum, Kencana*, Jakarta.

_____, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Media, Jakarta.

Manan, Bagir, 1994, *Dasar-Dasar Konstitusional Peraturan Perundang-Undangan Nasional*, Fakultas Hukum Andalas, Padang.

_____, 2009, *Menegakkan Hukum, Suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta.

Margono, 2019, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mappiasse, Syarif, 2020, *Logika Pertimbangan Hukum Putusan Hakim*, Kencana, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

_____, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

_____, 2007, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Monstesquieu, 2007, *The Spirit of the Laws*, Nusa Media, Bandung.

Mujahiddin, Ahmad, 2007, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana Edisi Revisi*, Alumni, Bandung.

_____, 2012, *Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Untuk Mengatasinya*, Alumni, Bandung.

Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

_____, *Pengkajian Tentang Asas-Asas Pidana Indonesia Dalam Perkembangan Masyarakat Masa Kini dan Mendatang*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta.

Mulyadi, Lilik, Bettina Yahya, Budi Suhariyanto, 2019, *Urgensi Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.

_____, 2006, *Pergeseran Perspektif dan Praktik dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pemidanaan*, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta.

_____, 2010, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan dan Kebijakan Pidana, Filsafat Pemidanaan Serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Korban Kejahatan*, CV Mandar Maju, Bandung.

_____, 2010, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2015, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung.

_____, 2020, *Menggagas Model Ideal Pedoman Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Nawawi Arief, Barda 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Konsep Penyusunan KUHP Baru*, Kencana, Jakarta.

_____, 2004, *Sistem Pemidanaan Dalam Ketentuan Umum Buku 1 RUU KUHP*, Kencana, Yogyakarta.

- _____, 2009, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- _____, 2017, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Perspektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang.
- _____, 2018, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- Nurdjana, IGM, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Korupsi “Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum”*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1991, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.
- Rapar, Jan Hendrik, 1996, *Pengantar Logika*, Kanisius, Yogyakarta.
- Remmelink, Jan, 2014, *Hukum Pidana Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan pandangannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rifai, Ahmad, 2020, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rizki Akbari, Anugrah, Adery Ardhan Saputro, Andreas Nathaniel Marbun, 2017, *Memaknai dan Mengukur Disparitas : Studi terhadap Praktik Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi*, Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, Jakarta.
- S. Lumbun, Ronald, 2011, *PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Wujud Kerancuan Antara Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Seno Adji, Oemar, 1980, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta.
- Setiady, Tolib, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penintensier di Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Sholehuddin, M., 2007, *Kebijakan Pidana dan Pemidanaan*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sinaga, Dahlan, 2015, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Perspektif Pancasila*, Nusa Media, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soeroso, R., 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sumaryanto, A. Djoko, 2009, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.

Supandriyo, 2019, *Asas Kebebasan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Kajian Komprehensif Terhadap Tindak Pidana Khusus Dengan Ancaman Minimum Khusus*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.

Surachmin dan Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sutiyoso, Bambang dan Sri Hartuti Puspitasari, 2005, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman*, UII Press, Yogyakarta.

Sutiyoso, Bambang, 2006, *Metode Penemuan Hukum : Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta.

SW. Sumardjono, Maria, 2019, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Syamsudin, M., 2012, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana, Jakarta.

Syarifuddin, H.M. , 2021, *Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Bandung.

_____, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung.

_____, 2018, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Widodo, J. Pajar, 2013, *Menjadi Hakim Progresif*, Indep Publishing, Bandar Lampung.

Witanto, Darmoko Yuti. dan Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013, *Diskresi Hakim : Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substanstif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung.

Yahya Harahap, M., 2005, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 832).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 42).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 387) Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3316).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5077).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3209).

C. Karya Ilmiah

Adji, Indriyanto Seno, 2020, “PERMA NO. 1 TAHUN 2020 : Antara *Freedom of Judiciary*, *Straftoemeting*, Metode EAL dan Disparitas-Uniformitas Pemidanaan”.

- Ali, Mahrus, 2018, “Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 25 Issue 1, Januari 2018.
- Floranita Adonara, Firman, 2015, “Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12 No. 2, Juni 2015.
- Gunarto, Marcus Priyo, 2021, *Slide Materi Webinar Mahumpiki Politik Pembaharuan Hukum Pidana Di Masa Darurat (Pedoman Pemidanaan)*.
- _____, 2009, “Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan”, *Mimbar Hukum*, Volume 21 Nomor 1, Februari 2009.
- M. Wantu, Fence, 2007, “Antinomi Dalam Penegakkan Hukum Oleh Hakim”, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No. 3, Oktober 2007.
- Marzuni, Elfi, 2005, “Penerapan Asas Kebebasan Hakim Dalam Mengambil Putusan Perkara Pidana”, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Muhammad, Rusli, 2006, “Tinjauan Kritis Terhadap Kebijakan Pengaturan Masalah Pidana dan Pemidanaan Dalam RUU KUHP”, *Jurnal Hukum*, No. 2 Vol. 13, Mei 2006.
- Mulyadi, Lilik, “Pergeseran Perspektif Dan Praktik Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pemidanaan”, *Badilum Mahkamah Agung*.
- Molly, Cheang, “*Disparity of Sentencing*”, Singapore Malaya Law Journal, PTE Ltd, 1977.
- Pomolango, Nawawi, “Slide Presentasi Webinar Sosialisasi Publik Perma Nomor 1 Tahun 2020”
- Respationo, H.M. Soerya, 2013, “Putusan Hakim : Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum”, *Jurnal Hukum Yustitia*, Vol. 2 No. 2, Mei-Agustus 2013.
- Setyanegara, Ery, 2013, “Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Dintinjau Dari Keadilan Substantif)”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-44 No.4, Oktober-Desember 2013.

Subiharta, 1999, “Kebebasan Hakim Dalam Mengambil Putusan Perkara Pidana di Lingkungan Peradilan Umum”, *Tesis*, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Supandriyo, 2018, “Asas Kebebasan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Dengan Ancaman Minimum Khusus”, *Disertasi*, Program Studi Doktorat Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Syarifuddin, H.M., “*Policy Brief* Urgensi Pedoman Pemidanaan Demi Mencapai Pemidanaan Yang Adil, Transparan, Proporsional dan Mengeliminir Disparitas”.

Zulfa, Eva Achjani, 2011, “Proporsionalitas Penjatuhan Pidana”, *Jurnal Hukum Tahun ke 41 Nomor 2*, April-Juni 2011.

D. Internet

Aida Mardatillah, Hukum Online, “Dua Profesor Ini Sebut Perma Pemidanaan Perkara Tipikor Batasi Kemandirian Hakim”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f2bfe025dc90/dua-profesor-ini-sebut-perma-pemidanaan-perkara-tipikor-batasi-kemandirian-hakim>, diakses pada tanggal 30 September 2021.

Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, KBBI Daring, “asas”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/asas>, diakses pada tanggal 29 April 2021.

Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, KBBI Daring, “kebebasan”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebebasan>, diakses pada tanggal 29 April 2021.

Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, KBBI Daring, “hakim”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hakim>, diakses pada tanggal 29 April 2021.

Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, KBBI Daring, “pemidanaan”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemidanaan>, diakses pada tanggal 29 April 2021.

Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, KBBI Daring, “keadilan”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keadilan> diakses pada tanggal 29 April 2021.

Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, KBBI Daring, “pedoman”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pedoman>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2021.

Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, KBBI Daring, “sistem”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sistem>, diakses pada tanggal 18 November 2021.

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, “Sosialisasi Publik Perma Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor”, <http://mappifhui.org/2020/12/03/sosialisasi-publik-perma-no-1-tahun-2020-tentang-pedoman-pemidanaan-pasal-2-dan-pasal-3-undang-undang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi/>, diakses pada tanggal 14 Maret 2021.

Muhammad Yasin, Hukum Online “*Sentencing Council* Peluang KY Mengawal Konsistensi Putusan Hakim”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt6173f46b66ccc/sentencing-council--peluang-ky-mengawal-konsistensi-putusan-hakim>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2021.

Rofiq Hidayat, “Pengaturan Sanksi Pidana Tidak Boleh Dituangkan Dalam Aturan Turunan”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5faa40f053a07/pengaturan-sanksi-pidana-tak-boleh-dituangkan-dalam-aturan-turunan>, diakses pada tanggal 24 Desember 2021.